

## **SISTEM INFORMASI, PRODUKTIVITAS UMKM, DAN KONTRIBUSI PEMERINTAH PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DEMI MEWUJUDKAN DESA BALESARI SEBAGAI DESA WISATA**

Endang Kartini Panggiarti<sup>1</sup>, Supanji Setyawan<sup>2</sup>, Deni Ramdani<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Endang Kartini Panggiarti dan Supanji Setyawan

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Untidar

<sup>3</sup>Deni Ramdani

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Untidar

### **ABSTRACT**

Balesari village Windusari District of Magelang District designated as a village built Tidar University during the period of 3 years. So, the researchers wanted to identify the productivity of SMEs in the village Balesari and the government's contribution to improving the welfare of society, especially in order to realize Balesari village as a tourist village.

The observations were made with the sorting of data samples that match the criteria, using purposive sampling research sample using at least 5-8 respondents in each village, bringing the total amount to more than 30 samples. This study examined the role of accounting information system through the development of SME productivity. The mechanism accounting information system development there are some procedures that need to be understood and followed by the village community in order to obtain authorization Balesari administratively, ie License, IUI, TDI, HO Permit and others. Exploration Balesari village aims to create *value added activities* so that it can bring in revenue and tourists.

**Keyword:** *accounting information system, purposive sampling, value added activities, productivity, government contributions*

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan dunia usaha semakin pesat meliputi segala aspek kehidupan, baik teknologi, budaya, keilmuan, pendidikan dan sebagainya. Di daerah pun juga mengalami perkembangan dan pergeseran akibat kemajuan globalisasi. Setiap daerah memiliki otonomi, sehingga daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur sendiri daerahnya. Sebagai akibat kebijakan pemerintah pusat, agar pemerintah daerah mampu mengelola daerahnya sendiri. Setiawati (2007) menambahkan bahwa teknologi informasi telah menciptakan keunggulan kompetitif bagi dunia usaha, dan perannya ada empat macam teknologi yang menonjol yaitu teknologi informasi, teknologi manufaktur, teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Peran teknologi tersebut mampu menggeser budaya masyarakat yang kultural tradisional ke modernisasi.

Masyarakat yang menguasai teknologi dapat menggunakan teknologi tersebut untuk peningkatan kesejahteraan bagi dirinya sendiri. Teknologi yang ada digunakan untuk meningkatkan usaha sehingga memberikan kontribusi bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekitarnya. Sektor Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) menurut Rosadi (2014) merupakan sektor usaha yang dapat bertahan bahkan dapat memulihkan perekonomian nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan kontribusi yang diberikan UMKM diantaranya kemampuan menyerap tenaga kerja, sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto, dan jumlah usaha yang tersebar luas.

Sistem informasi akuntansi adalah bagian dari teknologi informasi yang pemanfaatannya perlu dioptimalkan sehingga dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat yang membutuhkan. Sistem informasi adalah suatu hal penting dalam suatu sistem agar perusahaan tersebut dapat menjalankan usahanya secara efisien. Lucas (2000) menjelaskan pengertian sistem informasi merupakan suatu bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Gambaran secara umum, masyarakat Desa Balesari yang sulit berkembang, padahal akses dari segala bidang terbuka luas. Fenomena ini menarik bagi peneliti untuk

mengenal lebih jauh tentang karakteristik masyarakat Desa Balesari.

Upaya pemerintah Kabupaten Magelang untuk memberikan fasilitasi promosi melalui media sistem informasi web sebenarnya merupakan kesempatan yang sangat besar yang sayang sekali jika tidak dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan sebaik mungkin. Hal ini terjadi barangkali karena kurang didukung oleh SDM di daerah yang kurang mampu menguasai teknologi informasi tersebut. Sehingga masyarakat daerah tersebut dan masyarakat luar kurang mendapatkan informasi yang dibutuhkan tentang Desa Balesari.

Desa Balesari yang sebagian besar penduduknya adalah perantau namun juga memiliki jenis usaha unik yaitu anyaman bambu, sangat menarik untuk diteliti dan diciptakan model suatu sistem informasi agar mereka (masyarakat) Desa Balesari dapat dan mampu mengakses sarana dan prasarana pendukung dari pemerintah atau pihak luar untuk memanfaatkan peluangnya karena telah tercipta sistem informasi. Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu model sistem informasi agar masyarakat Desa Balesari mampu mengakses peluang-peluang dari pihak ketiga melalui sarana sistem informasi. Maka dari itu penelitian ini berjudul "Model Pengembangan Sistem Informasi, Produktivitas UMKM dan Kontribusi Pemerintah pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat demi Mewujudkan Desa Balesari sebagai Desa Wisata".

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui gambaran potensi masyarakat Desa Balesari
2. Merancang model pengembangan sistem informasi akuntansi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Balesari
3. Menganalisis model pengembangan sistem informasi yang dapat digunakan oleh desa tersebut untuk mengantarkan Desa Balesari sebagai desa wisata

Manfaat penelitian ini diantaranya adalah:

1. Menggali potensi masyarakat Desa Balesari. Daerah mana saja yang bisa dikembangkan dan daerah mana saja yang memerlukan pembinaan.
2. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah yang hendak dikembangkan diperlukan model pengembangan sistem informasi akuntansi

## TELAAH LITERATUR

### Sistem Informasi

Menurut Setiawati (2007) menyatakan bahwa pengembangan sistem adalah proses memodifikasi atau mengubah sebagian atau seluruh sistem informasi. Proses ini membutuhkan komitmen substantial mengenai waktu dan sumber daya serta merupakan aktivitas berkesinambungan dalam banyak organisasi/perusahaan. Pengembangan sistem dapat diartikan pula sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan/memperbaiki sistem yang telah ada. Setiawati juga menambahkan bahwa proyek pengembangan sistem, biasanya terdiri dari tiga fase umum, yaitu:

1. Analisis sistem meliputi formulasi dan evolusi solusi-solusi masalah sistem, dengan penekanan pada tujuan keseluruhan sistem yang saling berhubungan dan terkadang muncul konflik satu sama lainnya.
2. Perancangan sistem adalah proses menspesifikasikan rincian solusi yang dipilih oleh proses analisis sistem, termasuk evaluasi efektivitas dan efisiensi relatif dalam perancangan sistem dan lingkup kebutuhan keseluruhan sistem serta harus menghasilkan *blue print*/cetak biru bagi kelengkapan sistem. Bagan IPO dan HIPO, bagan arus program, pencabangan dan tabel keputusan, serta teknik-teknik sistem lainnya banyak digunakan dalam pendokumentasian rancangan sistem informasi.
3. Implementasi sistem merupakan proses penempatan rancangan prosedur-prosedur dan metode-metode baru atau revisi ke dalam operasi, yang mencakup pelaksanaan rancangan. Pelaksanaan rancangan secara rinci selama tahap implementasi seringkali mencakup pemrograman komputer. Dokumentasi merupakan salah satu bagian penting dalam implementasi sistem.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis alternatif pertama, yaitu

H1: Sistem Informasi memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Balesari

### Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang sering disingkat dengan UMKM memiliki peranan penting dalam mendongkrak perekonomian suatu negara. Berdasarkan Undang Undang No 20 tahun 2008 tentang usaha mikro ecil dan menengah, maka yang dimaksud dengan usaha mikro kecil dan menengah, yaitu :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis ke dua yaitu:

H2: Produktivitas UMKM memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Balesari

### **Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah**

Dalam undang-undang organik yang mengatur tentang pemerintah daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dinyatakan dengan jelas tentang pengertian pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 maka terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan pemerintahan daerah. Menurut Affandi (2000), secara teoritis ada enam elemen utama yang membentuk pemerintahan daerah yaitu:

- a. Adanya urusan otonomi yang merupakan dasar kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

- b. Adanya kelembangan yang merupakan perwadhahan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah.
- c. Adanya personil pegawai yang bertugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah.
- d. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
- e. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang mendapat legitimasi untuk memimpin penyelenggara otonomi daerah.
- f. Adanya manajemen urusan otonomi yaitu penyelenggaraan otonomi daerah agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel.

Berdasarkan RPJM pemerintah Kabupaten Magelang menjabarkannya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Magelang. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Undang tentang RPJP Daerah Tahun 2005–2025 adalah untuk (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Undang tentang RPJP Daerah Tahun 2005–2025 adalah untuk (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Mengutip peraturan daerah diatas yaitu

“Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada setiap generasi dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat”. Berarti pemerintah daerah Kabupaten Magelang konsisten dan berkomitmen dalam meningkatkan pembangunan daerahnya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan peraturan daerah diatas, maka pemerintah daerah harus dapat bersinergi dengan masyarakat. Karena program pemerintah daerah Kabupaten Magelang mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Peran dan fasilitas pemerintah akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap kemajuan wilayahnya. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis ke tiga yaitu:

H3: Kontribusi pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Balesari.

#### **Hubungan Sistem Informasi Akuntansi, Produktivitas UMKM dan Kontribusi Pemerintah**

Sistem informasi akuntansi pada zaman modern dan canggih ini perlu diterapkan untuk menuju kesejahteraan masyarakat. UMKM perlu menggeliatkan produktivitasnya sehingga mereka mampu menghidupi diri mereka sendiri dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Semua unsur tersebut saling berkaitan. Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis ke empat sampai dengan ke delapan sebagai berikut:

H4: Sistem Informasi memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas UMKM

H5: Produktivitas UMKM memberikan pengaruh positif terhadap kontribusi pemerintah

H6: Sistem Informasi memberikan pengaruh positif terhadap kontribusi pemerintah

H7: Sistem Informasi, Produktivitas UMKM dan Kontribusi Pemerintah secara simultan akan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,

#### **METODE PENELITIAN**

##### **Sumber Data Penelitian**

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari data Pemerintah Kabupaten Magelang, Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Magelang.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner, wawancara dan studi literatur. Kuesioner dilakukan dengan mencari informasi tentang bagaimana kondisi produk masing-masing daerah, produktivitas UMKM dan apa saja kontribusi atau peran pemerintah dalam melayani atau membantu perekonomian Desa Balesari. Selain data di atas, juga data diperoleh dari data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari BPS, website tentang situs Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.

#### **Pengukuran**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif menguraikan dan menggambarkan potensi masyarakat tentang industri/usahanya, pendapatannya serta produktivitas UMKM di masing-masing daerah. Penelitian kuantitatif menjelaskan seberapa berpengaruhnya sistem informasi akuntansi, produktivitas UMKM, dan kontribusi pemerintah terhadap peningkatan potensi masyarakat Desa Balesari. Kemudian menganalisisnya apakah potensi tersebut dapat mewujudkan Desa Balesari sebagai desa wisata.

#### **Pemilihan sampel**

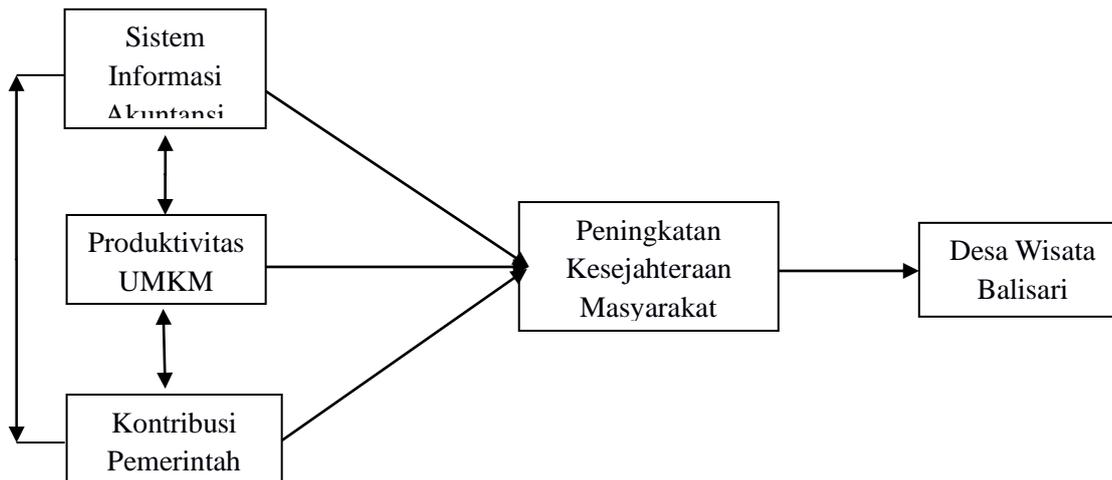
Ada beberapa tipe pemilihan sampel yaitu pemilihan sampel dengan cara purposive sampling. Setiap daerah atau pedusunan di Desa Balesari diambil 10 – 20 orang sebagai sampel dalam penelitian ini. Dari sampel tersebut peneliti melakukan wawancara, apa saja permasalahan dan kebutuhan mereka. Terutama menyangkut usaha dan produktivitas mereka.

#### **Pihak-pihak yang terlibat**

Pada penelitian ini akan melibatkan masyarakat Desa Balesari dan perangkat desa Balesari. Perangkat Desa Balesari terdiri dari Kepala Desa dan Staf, dan Kepala Dusun, masyarakat yang memiliki usaha yang dipilih secara acak.

#### **Model Penelitian**

Berikut ini adalah model penelitian tentang sistem informasi akuntansi, produktivitas UMKM, kontribusi pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Desa Wisata Balesari. Model penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Penelitian**

### Uji Statistik

Penelitian ini terdiri dari variabel independen dan dependen. Variabel independen adalah sistem informasi (SI), produktivitas UMKM (PU) dan kontribusi pemerintah (KP). Sedangkan variabel dependen adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat (PKM) dan potensi desa wisata. Dalam penelitian ini, model penelitian yang hendak peneliti ajukan adalah:

$$PKM = a + b_1SI + b_2PU + b_3KP + e \quad (1)$$

$$KP = a + b_1SI + b_2PU + e \quad (2)$$

$$SI = a + b_1PU + b_2KP + e \quad (3)$$

Di mana:

PKM = peningkatan kesejahteraan masyarakat

SI = informasi akuntansi

PU = produktivitas UMKM

KP = kontribusi pemerintah

E = residual

### HASIL DAN DISKUSI

Gagasan yang hendak peneliti sampaikan adalah (1) bagaimana gambaran potensi masyarakat Desa Balesari, (2) bagaimana model pengembangan sistem informasi akuntansi untuk Desa Balesari, (3) bagaimana produktivitas UMKM di Desa Balesari, (4) apakah pemerintah memberikan kontribusi memadai untuk Desa Balesari, dan (5) apakah model pengembangan sistem informasi akuntansi dapat digunakan untuk mencapai terwujudnya Desa Balesari sebagai Desa Wisata. Oleh karena itu, peneliti akan mengulas beberapa hal sesuai dengan gagasan yang disampaikan.

### Profil Kecamatan Windusari

Kecamatan Windusari merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang dengan luas 61,65 km<sup>2</sup> yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Secara geografis, Kecamatan Windusari

terletak di lereng/punggung bukit, yaitu antara lereng gunung Sumbing dan pegunungan Giyanti. Batas sebelah utara Kecamatan Windusari adalah Kecamatan Secang. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Secang dan Kota Magelang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bandongan, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kaliangkrik dan Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung (Statistik, 2016).

Ibukota Kecamatan Windusari terletak di Desa Windusari, yang berada pada ketinggian 663m di atas permukaan laut. Di Kecamatan Windusari terdapat 20 desa, yaitu Desa Dampit, Tanjungsari, Pasangsari, Kembangkuning, Balesari, Banjarsari, Banjarsedayu, Windusari, Candisari, Genito, Wonoroto, Girimulyo, Ngemplak, Kalijoso, Gunungsari, Mangunsarim, Kentengsari, Umbulsari, Semen dan Gondangrejo. Pemerintahan di Kecamatan Windusari terdiri dari tiga tingkatan, yaitu dusun, RW dan RT. Secara keseluruhan Kecamatan Windusari memiliki 123 dusun, 130 RW dan 456 RT. Desa Balesari memiliki 5 dusun, 7 RW dan 28 RT (BPS, 2016).

Berdasarkan hasil estimasi penduduk 2015, bahwa mayoritas desa di Kecamatan Windusari menunjukkan kecenderungan yang sama yaitu persentase penduduk laki-laki lebih tinggi daripada persentase penduduk perempuan. Dari 20 desa di Kecamatan Windusari,

hanya lima desa yang persentase penduduk perempuannya lebih tinggi daripada persentase penduduk laki-laki, yaitu Desa Balesari, Banjarsari, Banjarsedayu, Windusari dan Semen. Tentang data jumlah penduduk, Desa Balesari merupakan desa dengan jumlah rata-rata penduduk per rumah tangga terendah, yaitu 2,9 jiwa. Di Desa Balesari jumlah penduduknya sebanyak 2.725 dan 935 rumah tangga. (BPS, 2016).

Sarana dan prasarana kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang utama. Fasilitas yang tersedia di wilayah Kecamatan Windusari antara lain meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, PKD/Pos Kesehatan Desa, Praktek Bidan dan Posyandu. Dan hampir di semua desa memiliki bidan desa. Hanya ada 2 (dua) desa yang tidak memiliki bidan desa yaitu Desa Dampit dan Desa Ngemplak (BPS, 2016).

### **Profil Potensi Masyarakat Desa Balesari**

Berdasarkan uraian tentang gambaran Kecamatan Windusari dan Desa Balesari diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penduduk mayoritas Desa Balesari berjenis kelamin perempuan
2. Terdapat 2,9 jiwa per rumah tangga
3. Telah memiliki sarana kesehatan berupa bidan desa di setiap desa

Haryati (2010) menjelaskan bahwa potensi masyarakat Desa Balesari adalah Kerajinan Bambu. Usaha kerajinan bambu ini pada tahun 2010 memiliki tenaga kerja 37, yang dapat ditingkatkan jumlah pengrajinnya dan ditingkatkan variasi model produk kerajinan bambu yang dihasilkan. Hal ini mungkin terjadi karena mayoritas penduduk Desa Balesari adalah perempuan dan perempuan lebih telaten untuk membuat kerajinan bambu daripada laki-laki, walaupun mungkin ada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki yang memproduksi kerajinan bambu.

### **Gambaran Produktivitas UMKM di Desa Balesari**

Haryati (2010) menjelaskan bahwa Desa Balesari merupakan desa yang memiliki usaha mikro kecil/industri rumah tangga yang pada tahun 2010 memiliki sejumlah 92 unit dan menyerap tenaga kerja 95 orang. UMKM di Desa Balesari diantara usaha pangan (bakso, ojek, gorengan) sejumlah 18 tenaga kerja, sandang (penjahit dan pengrajin kain perca) sejumlah 3 tenaga kerja, dan kerajinan bambu (gedeg, kepeng, kipas dan besek) sejumlah 37 tenaga kerja, serta lain-lain (bengkel, pengrajin arang, warung dan kios) sejumlah 39 tenaga kerja. Ada hal yang menarik di Desa Balesari yang ternyata memiliki kerajinan

bambu. Kerajinan Bambu ini bisa diangkat menjadi potensi wisata Desa Balesari sebagaimana Batik di daerah lain diangkat sebagai potensi Desa Wisata Batik. Demikian juga untuk kerajinan bambu ini dapat diangkat sebagai potensi Desa Wisata Bambu. Karena pada era saat ini, dengan kemajuan teknologi yang demikian canggihnya, pengrajin bambu sangat jarang dan bisa menjadikan sesuatu yang unit yang dapat mengundang wisatawan untuk berkunjung.

Selain potensi wisata Bambu untuk Desa Balesari, ada juga jenis potensi wisata lain yaitu:

- a. Wisata alam: Gunung Giyanti dan Gunung Sumbing
- b. Wisata budaya: Candi Selogriyo dan Candi Batur
- c. Wisata Religi : Khaul Simbah Rohmat
- d. Wisata Seni Budaya dan Kriya: Kuda lumping

Potensi-potensi wisata tersebut dapat ditingkatkan agar dapat meningkatkan kemakmuran desa dan menambah kesejahteraan masyarakat. Dengan cara dilakukan pembenahan kampung/desa dan promosi daerah wisata tersebut keluar untuk menarik minat wisata ke Kecamatan Windusari pada umumnya dan Desa Balesari pada khususnya.

Potensi usaha kerajinan bambu juga selayaknya ditingkatkan jumlah pengusahanya, dan ditingkatkan jenis produknya yang berasal dari bambu. Kemudian sering mengikuti pameran, dan mendirikan atau membentuk sentra atau pusat kerajinan bambu yang menjual beraneka jenis produk yang berasal dari bambu.

### **Peran Pemerintah dalam memberikan kontribusinya untuk Desa Balesari**

Saat ini pemerintah Kabupaten Magelang telah memfasilitasi di semua kecamatan sampai dengan desa media informasi berupa website untuk mempromosikan potensi di masing-masing daerahnya. Namun karena keterbatasan SDM yang ahli di bidang tersebut, dan belum optimalnya pengembangan potensi di Desa Balesari, sehingga informasi yang ada website sangat minim sekali. Sudah semestinya Desa Balesari memiliki seorang yang ahli dalam bidang sistem informasi dan menampilkan potensi serta pengetahuan umum tentang Desa Balesari, sehingga Desa Balesari memiliki kemampuan menjual. Menjual potensi daerahnya kepada masyarakat luar baik turis domestik maupun non domestik untuk singgah mengunjungi Desa Balesari dan segala sesuatu keunikan di dalamnya, terutama menampilkan usaha kerajinan bambu, yang merupakan ciri khas dan produksi utama di Desa Balesari.

### **Evaluasi Sistem yang Sedang Berjalan**

Daud dan Windana (2014) menjelaskan bahwa peran dan sistem informasi terhadap kemajuan organisasi sudah tidak diragukan lagi. Dengan dukungan sistem informasi yang baik maka sebuah perusahaan akan memiliki berbagai keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain. Hal ini semestinya juga dimanfaatkan oleh Desa Balesari dengan memanfaatkan sistem informasi yang ada untuk pengembangan desanya..

Berikut ini merupakan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap sistem informasi pengelolaan usaha di Desa Balesari yang telah berjalan paling tidak 10 tahunan, sebagai berikut:

1. Penduduk di Desa Balesari lebih banyak kaum perempuan dibandingkan dengan penduduk di desa lain.
2. Jumlah jiwa setiap rumah tangga di Balesari sekitar 3 jiwa setiap kepala keluarga, hal ini tergolong lebih sedikit jumlah jiwa per kepala keluarganya dibandingkan dengan desa lain
3. Mereka pekerja keras dan umumnya bekerja mandiri. Keterampilan yang dimiliki pada umumnya merupakan warisan dan turun temurun dari nenek moyang mereka.
4. Aktivitas kerja mereka dengan rumah tempat tinggal menjadi satu, hal ini dikarenakan karena mereka masih mengerjakan aktivitas rumah dikala mereka juga mengerjakan aktivitas kerja/usaha mereka.
5. Dari sisi permodalan, mereka masih menggunakan modal sendiri, karena proses produksinya tidak membutuhkan bahan baku dan bahan penunjang yang mahal. Semua bahan baku dan bahan penunjang ada disekitar tempat tinggal mereka. Selebihnya modal pinjaman dari sanak family atau pinjaman PKK setempat. Kondisi ini menyebabkan usaha relative stagnan (tidak berkembang) walaupun usaha telah dilakukan cukup lama (10 tahunan) dan usaha dilakukan di lokasi yang cukup strategis.
6. Pendampingan usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM belum optimal. Demikian pula akses perbankan masih sangat sedikit sekali menyentuh UMKM di Desa Balesari.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan di Desa Balesari, maka dapat disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi oleh desa tersebut adalah kurangnya akses dari pihak luar, yaitu akses perbankan, akses pengetahuan dan keterampilan (termasuk di

dalamnya pemahaman tentang manajemen keuangan, pembukuan akuntansi, sistem informasi akuntansi dll), akses pemasaran dan sebagainya.

### **Rancangan Model Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi untuk Desa Balesari**

Berikut ini disajikan bagan mengenai pengembangan sistem informasi akuntansi yang diusulkan untuk Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. Untuk pengusulan prosedur ini, ada beberapa prosedur yaitu:

1. Prosedur pengusulan usaha yang disebut dengan Tanda Daftar Industri (TDI). Pengusaha yang memiliki TDI, maka usahanya telah terdaftar di BPMPPT, dan berhak mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan. Untuk mendukung kepemilikan TDI, maka pengusaha harus memiliki akte pendirian usaha, dan izin gangguan (HO). Untuk izin HO atau izin tempat usaha bisa langsung ke BPMPPT. Pengusulan TDI ini tidak dikenakan biaya di BPMPPT Kabupaten Magelang.
2. Prosedur Izin Gangguan/izin tempat usaha. Pada prosedur ini memiliki syarat yang cukup banyak dan rumit. Prosedur ini diperlukan jika memang tempat usahanya nanti akan berpengaruh terhadap gangguan lingkungan dan memerlukan izin untuk mendirikan tempat usaha. Untuk pengusulan izin gangguan (HO) atau izin tempat usaha dikenakan biaya sebesar Indeks Luas Tempat Usaha x Indeks Penggunaan Mesin / Tidak x Tarif.
3. Prosedur pengajuan SIUP  
SIUP diperlukan bagi mereka yang memiliki usaha perdagangan. Ada beberapa persyaratan dan untuk mendapatkan SIUP tidak dikenakan biaya di BPMPPT Kabupaten Magelang.
4. Prosedur Izin Usaha Industri  
Prosedur ini berkaitan dengan usaha yang nantinya bersinggungan dengan lingkungan. Prosedur IUI ini tidak dikenakan biaya di BPMPPT Kabupaten Magelang.
5. Prosedur Izin Usaha Pariwisata  
Untuk pengajuan izin usaha pariwisata, selain persyaratan yang bersifat umum, ada beberapa persyaratan lainnya misalkan rencana kerja dan izin prinsip. Untuk pengajuan ini tanpa dipungut biaya.

Rincian prosedur tersebut dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.

### Peran Model Pengembangan Sistem Informasi dalam Upaya Mewujudkan Desa Balesari sebagai Desa Wisata

Pada tahun 2015, Rektor Untidar telah mencanangkan Desa Balesari sebagai Desa Wisata. Harapan beliau, Desa Balesari semakin berkembang, dapat menarik wisatawan untuk mengagumi keindahan pegunungan Sumbing, menikmati panorama alam yang masih alami, dan ketika ramai wisatawan maka akan banyak didirikan *home stay* untuk tempat tinggal sementara para wisatawan tersebut. Untuk mewujudkan harapan tersebut, diperlukan pengembangan pengetahuan dan kesiapan bagi penduduk Desa Balesari. Hal-hal yang perlu dipersiapkan diantaranya adalah:

1. Menyiapkan manajemen untuk mengelola dan mengembangkan Desa Balesari sebagai desa wisata
2. Jika Kerajinan Bambu dapat diangkat sebagai suatu ikon Desa Balesari, sebagaimana Desa Mancasan di Kabupaten Sragen, atau di Pekalongan dan di daerah lain sebagai Desa Wisata Batik, maka Desa Balesari dapat diangkat sebagai Desa Wisata Bambu. Yang tentu saja dipenuhi oleh sebagian besar pengrajin bambu di daerah tersebut.
3. Mengurus surat izin usaha pariwisata di dinas setempat yaitu BPMPPT.
4. Menggiatkan pengrajin Kerajinan Bambu agar mereka mampu berkembang, dan bersaing, menciptakan Desa Wisata Bambu yang terefleksikan melalui rumah ataupun kios-kios kecil dengan produk olahan dari bambu.

Jika pengrajin di Desa Balesari telah mendapatkan surat-surat tersebut diatas, maka mereka dianggap layak untuk menerima layanan dari perbankan (*bankable*). Pada kemudian hari mereka memanfaatkan untuk mendapatkan pinjaman guna tambahan permodalan mereka. Beberapa persyaratan untuk mendapatkan pinjaman bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari beberapa perbankan yang memiliki beberapa kesamaan prosedur pengajuan, yaitu yang dapat dilihat pada lampiran 3.

#### Uji Asumsi klasik dan uji regresi

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov yang hasil pengujiannya menunjukkan bahwa model regresi memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas uji Kolmogorov Smirnov pada regresi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,608 dengan probabilitas signifikansinya 0.853 dimana nilai

tersebut lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . (Tabel dapat dilihat di lampiran).

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa Sistem informasi, produktivitas UMKM, dan Kontribusi pemerintah memiliki nilai tolerance lebih besar 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari  $< 10$ . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (independen) yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas (tabel dapat dilihat di lampiran).

Hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji Glejser menunjukkan bahwa model regresi bebas dari masalah Heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi variabel (Sistem informasi, Produktivitas UMKM, dan Kontribusi pemerintah) lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson terlihat angka D-W sebesar +1,977. Hal ini berarti model regresi di atas tidak terdapat masalah autokorelasi (tabel bisa dilihat di lampiran).

#### Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan tabel 4 di bawah ini, maka variabel Sistem informasi, Produktivitas UMKM, berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan. Artinya bahwa semakin tinggi indeks Sistem informasi, Produktivitas UMKM, maka peningkatan kesejahteraan akan semakin besar. Namun berbeda dengan Kontribusi pemerintah yang tidak pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Variabel Dependen	Koefisien	t-hitung	Sig.
Model 1: Konstanta	6,466			
Sistem Informasi Akuntansi	Peningkatan kesejahteraan	15,771	3,114	,004
Produktivitas UMKM		,412	3,640	,001
Kontribusi pemerintah		,079	,213	,833

Sumber: Output SPSS

#### Hasil uji F

Dari hasil uji pengaruh simultan menunjukkan nilai F hitung sebesar 5,419 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa Sistem informasi, Produktivitas UMKM, dan Kontribusi pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan.

Tabel 5. Hasil Uji F

Anova<sup>b</sup>

Model	Surn of Squares	df	Mean Sauare	F	Sig.
1 Regression	4640,902	5	928,180	5,419	,001 <sup>b</sup>
Residual	5823,098	34	171,268		
Total	10464,000	39			

- a. Dependent Variable: Peningkatan Kesejahteraan  
 b. Predictor: (Constant), Kontribusi pemerintah, Produktivitas UMKM, Sistem Informasi Akuntansi

Sumber: Output SPSS

### Hasil Uji t

Hasil analisis uji t dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Hasil Uji t

	Ustan-dardi-zed	Coeffi-cients	Standar-dized Coeffi-cients		
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Consta nt)	6,466	11,795		,548	,587
Sistem informa si akuntan si	15,771	5,065	,488	3,114	,004
Produkti vitas UMKM	,412	,113	,498	3,640	,001
Kontrib usi pemerin tah	,079	,371	,030	,213	,833

Sumber: output SPSS

Dari hasil tersebut apabila ditulis dalam bentuk standardized dari persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$\text{Peningkatan Kesejahteraan} = 6,466 + 15,771(X_1) + 0,412(X_2) + 0,079(X_3)$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut menunjukkan besaran konstanta dan koefisien regresi yang diperoleh dari tabel 4. Berdasarkan tabel dan persamaan regresi dapat dijelaskan bahwa masing-masing variabel independen mampu menjelaskan terhadap variabel dependen secara individu.

- a. Variabel Sistem informasi

Ho:  $b_1 = 0$  : Sistem informasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan.

Ha:  $b_1 > 0$  : Sistem informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan.

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel Sistem informasi diperoleh nilai t hitung = 3,114 dengan tingkat signifikansi 0,004. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5%, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, maka hipotesis pertama diterima. Artinya bahwa Sistem informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan.

- b. Variabel Produktivitas UMKM

Ho:  $b_1 = 0$ : Produktivitas UMKM tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan.

Ha:  $b_1 > 0$ : Produktivitas UMKM berpengaruh positif signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan.

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel Produktivitas UMKM diperoleh nilai t hitung = 3,640 dengan tingkat signifikansi 0,001. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5%, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, maka hipotesis kedua diterima. Artinya bahwa Produktivitas UMKM berpengaruh positif signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan.

- c. Variabel Kontribusi pemerintah

Ho:  $b_1 = 0$ : Kontribusi pemerintah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan.

Ha:  $b_1 > 0$ : Kontribusi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan.

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel Kontribusi pemerintah diperoleh nilai t hitung = 0,213 dengan tingkat signifikansi 0,833. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 5%, yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian, maka hipotesis ketiga ditolak. Artinya bahwa Kontribusi pemerintah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan Kesejahteraan.

## Simpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mengetahui lebih mendalam mengenai potensi masyarakat Desa Balesari dalam mewujudkan Desa Balesari sebagai Desa Wisata. Berdasarkan uraian yang diatas, maka beberapa kesimpulan sebagai berikut:

### 1. Gambaran potensi masyarakat Desa Balesari

Gambaran potensi masyarakat Desa Balesari pada umumnya jumlah penduduk Desa Balesari kebanyakan perempuan. Mereka mandiri dan pekerja keras yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan secara turun menurun dari ayah ibu mereka. Potensi usaha di Desa Balesari adalah Kerajinan Bambu, disamping yang lain juga memiliki potensi yaitu di bidang pangan dan sandang. Olahan produk bambu yang dihasilkan diantaranya gedeg, kepeng, kipas, besek dan lain sebagainya.

### 2. Produktivitas UMKM Desa Balesari

Produktivitas masyarakat Desa Balesari selain pengrajin Kerajinan Bambu, diantaranya adalah usaha pangan (bakso, ojek, gorengan), sandang (penjahit dan pengrajin kain perca), dan lain-lain (bengkel, pengrajin arang, warung dan kios).

3. Pemerintah memberikan kontribusi yang memadai Saat ini BPMPPT (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) melayani kebutuhan masyarakat tanpa dikenai biaya dan dikenai biaya untuk fasilitas tertentu. Hal ini dimaksudkan tentu saja untuk mendongkrak minat pengusaha-pengusaha dalam rangka meningkatkan omzetnya dengan cara mendaftarkan usahanya di dinas terkait. Selain itu, juga untuk memenuhi tuntutan masyarakat yaitu diantaranya memiliki surat izin usaha dan SIUP. Dengan kelengkapan persyaratan administrasi tersebut, diharapkan menjadikan usaha mereka *bankable*, yang dapat diakses oleh dunia perbankan, yang memerlukan persyaratan tertentu.

### 4. Hasil uji statistik

#### 1) Uji asumsi klasik

Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan uji regresi. Hasil uji asumsi klasik menyatakan bahwa penelitian ini bebas dari masalah yang mengandung asumsi klasik. Sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan pada tingkat selanjutnya.

#### 2) Uji regresi

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, menyatakan bahwa variabel Sistem informasi, Produktivitas UMKM, berpengaruh terhadap

peningkatan kesejahteraan. Artinya bahwa semakin tinggi indeks Sistem informasi akuntansi, Produktivitas UMKM, maka peningkatan kesejahteraan akan semakin besar. Namun berbeda dengan Kontribusi pemerintah yang tidak pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa sebenarnya informasi bisa mereka terima dan produktivitas UMKM mereka tinggi yang dapat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun kurang didukung kontribusi pemerintah yang dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan.

### 3) Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Artinya bahwa Sistem informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan.

Hipotesis kedua diterima, artinya bahwa Produktivitas UMKM berpengaruh positif signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan. Namun Hipotesis ketiga ditolak, yang berarti bahwa kontribusi pemerintah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan.

### 5. Implementasi pengembangan sistem informasi akuntansi

Saat ini sebagian besar masyarakat Desa Balesari belum memahami tentang sistem informasi apapun di Kabupaten Magelang. Hal ini yang menjadikan mereka sulit mengembangkan usaha karena beberapa kendala administrasi dan promosi. Hal-hal yang dilakukan adalah mengenalkan kepada mereka beberapa prosedur untuk memenuhi perizinan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika persyaratan administrasi tentang usaha telah mereka miliki, mereka layak untuk mendapatkan akses perbankan (*bankable*).

### 6. Sistem informasi dan kontribusi pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat

Desa Balesari yang sebagian besar penduduknya memiliki usaha sebagai pengrajin Bambu bisa menjadi ikon atau maskot Desa Balesari untuk mempromosikan diri dan mengembangkan produknya ke dunia luar. Jika para pengrajin bambu ini berkembang, didukung dengan keindahan alam yang dimiliki Desa Balesari, maka pewujudan Desa Balesari sebagai desa wisata dapat terwujud. Seperti desa-desa wisata lainnya yang mengunggulkan usaha mikro daerahnya, misalkan desa wisata batik, maka di Desa Balesari bisa menjadi Desa Wisata Bambu. Yang

harapannya nanti Desa Balesari mampu memproduksi berbagai olahan bambu yang memiliki nilai jual tinggi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Rosadi, S (2014), Analisis Bentuk-bentuk Laporan Keuangan dan Efektivitas Laporan Keuangan pada UMKM, *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 10, No.1, April 2014, Hal. 23-34.
- Suhairi, (2004), Personality, Accounting Knowledge, Accounting Information Usage and Performance: A Research on Entrepreneurship of Indonesia Medium Industries, Disertasi, USM, Malaysia.
- Satyo, (2005), UKM dan Kebutuhan Standar, *Media Akuntansi*, 43 (XII), 4.
- Sixpria, N, Suhartati, T, dan Warsini, S (2014), Implementasi Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Dalam Proses Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), *Account Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Volume 1 No. 2 Desember 2014, hal. 90-96.
- Kurniawati, E.P, Nugroho, P.I., Arifin, A (2012), Penerapan Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), *JMK* Vol.10., No.2, September 2012, hal. 1-10
- Martin, R, (2012), Penerapan Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi – VOL. 1, NO. 2.*
- Bonnie, Soeherman; Seteven, Ariyanto; et al, (2010), *Membangun sistem informasi perusahaan Jasa*, PT elex media komputindo Jakarta.
- Pontjowinoto, Didit. 1991. *Alternatif Reformasi Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Prisma No. 8 agustus 1991. LP3ES. Jakarta.
- Setiwati, Ira (2007), Peran Teknologi Informasi dalam Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sebagai sarana Peningkatan Kinerja Perusahaan, *Fokus Ekonomi*, Vol.2 No.1, Juni 2007 : 47-55
- Bodnar G.H, dan Hoopwood (2006), *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Sembilan, Jakarta
- Haryati, dkk (2010), Profil Industri Mikro Kecil Pedesaan Studi Kasus di Desa Balesari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, *Jurnal Inovasi* Vol. 34 No.2, 15 September 2010
- Daud, R dan Windana, V.M (2014), Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas Berbasis Komputer pada Perusahaan Kecil (Studi Kasus pada PT Trust Technology), *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Vol.12, No.1, Maret 2014.

Lampiran1. Bagan sistem informasi pengusulan usaha, izin gangguan, SIUP, izin usaha industri

Komponen	Prosedur Pengusulan Usaha (Tanda Daftar Industri (TDI)	Prosedur Izin Gangguan/HO/izin tempat usaha	Prosedur Pengajuan SIUP	Prosedur Izin Usaha Industri
Input	1. Nama pengusaha (mandiri/Kel	1. Mengisi formulir 2. Fotokopi KTP	1. Fotokopi KTP	1. Mengisi Formulir

	<p>Usaha Bersama (KUB), koperasi, sentra, dll.</p> <p>2. Mengisi formulir permohonan</p> <p>3. Surat pengantar dari kelurahan/desa</p> <p>4. Fotokopi KTP pemilik/pimpinan perusahaan</p> <p>5. Fotokopi akte pendirian bahan usaha</p> <p>6. Fotokopi Surat Ijin Gangguan (HO)</p>	<p>3. Fotokopi surat ijin lokasi/persetujuan bupati</p> <p>4. Fotokopi NPWP</p> <p>5. Gambar letak usaha</p> <p>6. Fotokopi bukti kepemilikan tanah/sertifikat tanah</p> <p>7. Rancangan tata letak instalasi mesin / peralatan dan perlengkapan bangunan industri</p> <p>8. Persetujuan tertulis para tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi</p> <p>9. Bagan alur proses produksi</p> <p>10. Legalisasi dan pertimbangan Kades / Kelurahan dan pejabat wilayah setempat</p> <p>11. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Pembuatan dokumen Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan</p> <p>12. Mengisi Formulir Pakta Integritas</p> <p>13. Mengisi Formulir Surat Kuasa jika pengurusan izin diwakilkan</p> <p>14. Melampirkan Surat Izin</p>	<p>2. Fotokopi NPWP</p> <p>3. Fotokopi surat ijin gangguan (HO)</p> <p>4. Neraca awal perusahaan</p> <p>5. Fotokopi akte pendirian koperasi (bagi koperasi)</p> <p>6. Fotocopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi teknis (bagi koperasi)</p>	<p>Permohonan</p> <p>2. Fotocopi Akte Pendirian Badan Usaha</p> <p>3. Fotocopi KTP pemilik</p> <p>4. Fotocopi NPWP</p> <p>5. Surat Izin Gangguan (HO)</p> <p>6. UKL dan UPL / AMDAL</p> <p>7. Struktur Organisasi</p> <p>8. Izin Lokasi / Izin Pemanfaatan Tanah</p> <p>9. IMB</p> <p>10. Rekaman nama Direksi dan Dewan Komisaris</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Gangguan (HO) yang asli khusus untuk Daftar Ulang		
Proses	Menerima usulan dan memproses untuk mendapatkan tanda daftar industri	Menerima usulan dan memproses untuk mendapatkan ijin HO/izin tempat usaha	Menerima usulan dan memproses untuk mendapatkan SIUP	Menerima usulan dan memproses untuk mendapatkan izin usaha industri
Output	Tanda Daftar Industri (TDI)	Surat keterangan ijin HO/izin tempat usaha	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Surat izin usaha industri
Pihak terkait	Desa Balesari, BPPMPT	Desa Balesari, BPPMPT	Desa Balesari, koperasi, BPPMPT	Desa Balesari, BPPMPT
Pengendalian	Ketelitian pengelola dalam menyiapkan berkas	Ketelitian pengelola dalam menyiapkan berkas	Ketelitian pengelola dalam menyiapkan berkas, dan membuat neraca awal perusahaan	Ketelitian pengelola dalam menyiapkan berkas
Media	Komputer	Komputer	Komputer	Komputer
Biaya	Tanpa biaya	Indeks Luas Tempat Usaha x Indeks Penggunaan Mesin / Tidak x Tarif.	Tanpa biaya	Tanpa biaya

Sumber: BPPMPT, data diolah

Lampiran 2. Bagan sistem informasi pengajuan izin usaha pariwisata

Komponen	Prosedur Pengajuan Izin Usaha Pariwisata
Input	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Formulir Permohonan;</li> <li>2. IMB (bagi usaha kepariwisataan yang diawali dengan pembangunan fisik);</li> <li>3. Rencana kerja (proposal);</li> <li>4. Fotocopi akte pendirian perusahaan (bila merupakan Badan Usaha);</li> <li>5. Salinan bukti kepemilikan tanah atau sertifikat atau sewa tempat;</li> <li>6. Struktur organisasi perusahaan;</li> <li>7. Fotocopi KTP atau bukti diri lainnya;</li> <li>8. Izin Gangguan (HO);</li> <li>9. Izin Prinsip.</li> </ol>
Proses	Menerima usulan dan memproses untuk mendapatkan izin usaha pariwisata

Output	Surat izin usaha pariwisata
Pihak terkait	BPMPPPT
Pengendalian	Ketelitian pengelola dalam menyiapkan berkas
Media	Komputer
Biaya	Tanpa biaya

Sumber: BPMPPPT, data diolah

Lampiran 3. Persyaratan perkreditan KUR untuk 3 bank

Persyaratan	Nama Bank		
	BRI	BNI	BTN
Input	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Individu yang melakukan usaha yang layak</li> <li>2. Telah memiliki usaha aktif minimal 6 bulan</li> <li>3. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB dan kartu kredit</li> <li>4. Persyaratan administrasi berupa KTP, KK dan surat ijin usaha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP</li> <li>2. KK</li> <li>3. Surat ijin usaha</li> <li>4. NPWP (KUR Ritel)</li> <li>5. Surat keterangan izin usaha dari kelurahan (KUR Ritel)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta (untuk usaha mikro), 500 juta (usaha kecil), 10 M (usaha menengah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha</li> <li>2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta (usaha mikro), 2,5 M (usaha kecil), 50 M (usaha menengah)</li> <li>3. Milik Warga Negara Indonesia</li> <li>4. Berbentuk usaha orang perseorangan, milik keluarga, atau tergabung dalam koperasi.</li> <li>5. untuk Usaha Kecil dan Menengah, Berdiri sendiri dan bukan anak atau cabang perusahaan yang berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar</li> <li>6. Usaha perseorangan, badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.</li> </ol>
Proses	Diproses di Bank BRI	Diproses di Bank BNI	Diproses di Bank BTN
Output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksimal 25 juta (KUR Mikro), 35 -500 jt (KUR Ritel)</li> <li>2. Jangka waktu 3 tahun (kredit modal kerja), dan 5 tahun (kredit investasi) [KUR Mikro], 4 tahun (kredit modal kerja) dan 5 tahun (kredit</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan pinjaman sd 25 juta (KUR Mikro), 25 juta sd 500 jt (KUR Ritel)</li> <li>2. Jangka waktu 3 tahun (kredit modal kerja), 4 tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksimal kredit s/d Rp 500 juta</li> <li>2. Jangka waktu: KUR Modal Kerja maksimal 3 (<i>tiga</i>) tahun dan KUR Investasi maksimal 5 (<i>lima</i>) tahun</li> <li>3. Agunan pokok adalah</li> </ol>

	investasi) [KUR Ritel] 3. Suku bunga 9% 4. Tidak dipungut biaya provisi atau administrasi 5. Ada jaminan untuk KUR Ritel	(kredit investasi) [KUR Mikro], 4 tahun (kredit modal kerja), 5 tahun (kredit investasi) [KUR Ritel] 3. Jaminan: tidak wajib (KUR Mikro), ada jaminan (KUR Ritel) 4. Suku bunga: 9%	proyek yang dibiayai oleh bank 4. Bank dapat meminta agunan tambahan bila dianggap perlu sesuai pertimbangan Bank
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: BNI, BCA, BTN, data diolah

Lampiran 4. Uji Statistik Kolmogorov Smirnov

		Unstandardize Residual
N		40
Normal Parameters <sup>ab</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	12,21925589
Most Extreme Differences	Absolute	,096
	Positive	,096
	Negative	-,087
Kolmogrov-Smirnov Z		,608
Asymp Sig. (2-tailed)		,853

Test distribution is Normal

Calculated from data

Lampiran 5. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sistem Informasi Akuntansi	,668	1,498
Produktivitas UMKM	,875	1,143
Kontribusi pemerintah	,817	1,224

Sumber Output SPSS

Tabel 6. Hasil Uji Glejser

Model	Collinearity Statistics		Standard Coefficients		Sig.
	B	Std Error	Beta	T	
1 (Constant)	17.752	6.988		2.540	.016
Sistem informasi akuntansi	4.640	3.001	.294	1.547	.131
Produktivitas UMKM	-.072	.067	-	-	.291
Kontribusi pemerintah	-.375	.220	-	-	.097
			.178	1.073	
			.293	1.704	

Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber: Output SPSS

Tabel 7. Uji Durbin-Watson

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Squared	Adjusted R Squared	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.666 <sup>a</sup>	.444	.362	13,087	1,977

a. Predictors: (Constant), Kontribusi pemerintah, , Produktivitas UMKM, Sistem informasi akuntansi

b. Dependent Variable: Peningkatan Kesejahteraan